



2016

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA****B2**

Tambahkan Berita Negara R.I Tanggal 15 April 2016 No. 30

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. UU RUZHANUL ULUM, S.E.
2. Jabatan : BUPATI - (CALON BUPATI TASIKMALAYA PERIODE 2015 - 2020)
3. NHK : 143037
4. Alamat Kantor : Jl. BOJONGKONENG, BY PASS, SINGAPARNA, TASIKMALAYA
5. Tanggal Pelaporan : 19 Juli 2011, 30 Januari 2015

Status Laporan

	19 Juli 2011	30 Januari 2015
A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 1.832.000.000	Rp. 1.832.000.000
1. Tanah & Bangunan seluas 3.000 m2 & 930 m2, di Kabupaten TASIKMALAYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN, perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2003	Rp. 1.680.000.000	Rp. 1.680.000.000
2. Tanah & Bangunan seluas 560 m2 & 200 m2, di Kabupaten TASIKMALAYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004	Rp. 152.000.000	Rp. 152.000.000

143037

Status Laporan

19 Juli 2011

30 Januari 2015

B. HARTA BERGERAK**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

	19 Juli 2011	30 Januari 2015
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp. 645.000.000	Rp. 1.005.000.000
1. Mobil, merk TOYOTA HARRIER, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000
2. Mobil, merk TOYOTA HILUX, tahun pembuatan 2011, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
3. Mobil, merk TOYOTA KIJANG, tahun pembuatan 1985, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
4. Mobil, merk TOYOTA HARDTOP, tahun pembuatan 1980, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1997	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
5. Motor, merk HONDA CSX, tahun pembuatan —, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
6. Motor, merk HONDA CRF, tahun pembuatan —, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2005	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
7. Mobil, merk TOYOTA KIJANG INNOVA, tahun pembuatan 2012, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013 (Penambahan Data Baru)	-----	Rp. 185.000.000
8. Mobil, merk TOYOTA RUSH, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 (Penambahan Data Baru)	-----	Rp. 175.000.000

143037

Status Laporan

19 Juli 2011

30 Januari 2015

	19 Juli 2011	30 Januari 2015
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA		
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2002 sampai dengan 2011	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
C. SURAT BERTAGIH	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 100.000.000	Rp. 332.778.194
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan)	Rp. 100.000.000	Rp. 332.778.194
E. PIUTANG	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000
1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000
TOTAL HARTA (II)	Rp. 2.754.000.000	Rp. 3.346.778.194
III. HUTANG	Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG	Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 2.524.000.000	Rp. 3.116.778.194

143037

Status Laporan

19 Juli 2011

30 Januari 2015

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLH. DEPUTI

Jakarta, 18 September 2015
DIREKTORAT PENDAFTARAN
DAN PEMERIKSAAN LHKPN
DIREKTUR

TTD
CAHYA H. HAREFA

TTD
CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.